

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM
SIDANG PENGADILAN NEGERI
(Kajian Perbandingan Kasus-Kasus Pada
Pengadilan Negeri Sungguminasa)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Oleh
ASRUL MUH. DARWIS
NIM. 10 400 105 014

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

ABSTRAK

Nama Penyusun : Asrul Muh. Darwis
NIM : 10400105014
Judul Skripsi : **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri (Kajian Perbandingan Kasus-Kasus Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa)**

Masalah tindak pidana perkosaan memiliki dimensi yang sangat luas tidak hanya terbatas pada persoalan hukum saja. Faktor kultur masyarakat menjadi determinan yang ikut menentukan penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan tersebut. Faktor kultural tersebut ternyata justru menjadi hambatan dalam penyelesaian hukum disamping karakteristik peristiwa perkosaan itu sendiri yang membuat ketentuan yuridis positif menjadi sangat terbatas untuk menjangkaunya. Pembuktian merupakan kendala utama dalam pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana perkosaan berdasarkan mekanisme hukum.

Melalui penelitian ini diharapkan bisa ditelaah secara kritis sistem dan tata cara pembuktian dalam hukum acara pidana positif di Indonesia

yaitu khususnya untuk implementasinya terhadap tindak pidana perkosaan.

Pembuktian dimaksud untuk mengungkap terjadinya perkosaan, yang pada akhirnya dijadikan pegangan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pemerkosa sehingga baik si pelaku maupun korban, merasakan putusan tersebut adil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan (analisis) kualitatif. Meskipun berpijak pada wilayah hukum yang normatif namun segi-segi yuridis sosiologis dan yuridis filosofis turut dipergunakan untuk mendukung dan memperluas serta memperdalam pembahasan yang dilakukan.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Asrul Muh. Darwis, NIM: 10400105014, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri (Kajian Perbandingan Kasus-Kasus Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa)**, memandang bahwa skripsi ini tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 24 Mei 2010 M.
10 Jumadil Akhir 1431 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.
NIP. 19641231 1992030 2 015

Dra. Sohrah, M.Ag.
NIP. 19612101 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Mei 2010 M.
11 Jumadil Akhir 1431 H.

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Asrul Muh. Darwis
NIM :10400105014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri (Kajian Perbandingan Kasus-Kasus Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa),” yang disusun oleh Asrul Muh. Darwis, NIM: 10400105014, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010 M, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Makassar, 25 Mei 2010 M.
11 Jumadil Akhir 1431 H.

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. | (.....) |
| Sekretaris | : Drs. M. Thahir Maloko, M.HI. | (.....) |
| Munaqisy I | : Prof. Dr. H. Baso Midong, M.Ag. | (.....) |
| Munaqisy II | : Drs. Hamzah Hasan, M.HI. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dra. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. | (.....) |
| Pembimbing II | : Dra. Sohrab, M.Ag. | (.....) |

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. AMBO ASSE, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah SWT. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Sayidina Muhammad SAW. pembuka pintu Rahmat Allah, dan beserta segenap keluarga dan sahabatnya, dan siapapun yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Dengan petunjuk dan pertolongan Allah SWT. skripsi yang berjudul **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri (Kajian Perbandingan Kasus-Kasus Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa)** Akhirnya dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada program Sarjana (S1) UIN Alauddin Makassar.

Dalam proses perampungan skripsi ini, tidak sedikit kendala dan tantangan yang dihadapi penulis. Namun dengan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, semua itu dapat dilalui dan dihadapi. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya patut disampaikan masing-masing kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Muldiyati Darwis dan Muhammad Darwis yang dengan gigih membesarkan saya dan mendidik sejak kecil

dengan penuh rasa kasih sayang sehingga penulis bisa sampai di bangku kuliah.

2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar.
4. Bunda tercinta Dra. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. dan Dra. Sohrah, M.Ag selaku dosen pembimbing atas keikhlasan untuk meluangkan waktunya membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini
5. Ibunda Dra. Sohrah, M.Ag. dan Bapak Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Para Dosen beserta para Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Rekan-rekan seperjuangan saya teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan "05" tanpa terkecuali yang selalu berada di belakang saya untuk memberi dorongan dan motivasi.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan KKN Pinrang Angkatan 44 tahun 2009.

9. Orang yang spesial dalam hidup penulis yaitu Husnia (tunangan) yang dengan ikhlasnya terus memberi penulis semangat dan motivasi untuk terus maju dan berpikir ke depan.

Demikian kata pengantar ini, semoga apa yang menjadi cita-cita dibalik penulisan skripsi ini dapat tercapai dengan penuh harapan. Sehingga tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini dapat terealisasi. Amin....

Makassar, 25 Mei 2010 M.
11 Jumadil Akhir 1431 H.

Penulis,

Asrul Muh. Darwis
NIM :10400105014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-19 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah | 9 |
| C. Hipotesis | 10 |
| D. Pengertian Judul | 11 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| F. Tinjauan Pustaka | 16 |
| G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 19 |

| | |
|---|--------------|
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN PERKOSAAN | 20-39 |
| A. Pengertian Pembuktian | 20 |
| B. Fungsi Pembuktian | 23 |
| C. Pengertian Perkosaan dan Jenis-jenisnya | 25 |
| D. Sebab dan Akibat Perkosaan | 35 |
| BAB III PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN | 40-44 |
| A. Pengertian Visum et Repertum | 40 |
| B. Fungsi Visum et Repertum | 43 |
| BAB IV SISTEM PEMBUKTIAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA | 45 |
| A. Seputar Pengadilan Negeri Sungguminasa | 45 |
| B. Alat-alat Bukti di Pengadilan Negeri Sungguminasa | 48 |
| C. Sistem Pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa | 49 |
| D. Aplikasi dan Tujuan Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 65 |

| | |
|----------------------------|-------|
| BAB V PENUTUP | 68-69 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran-saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 71 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 74 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman kuno hingga akhir abad Pertengahan, pemerkosaan pada umumnya tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap seorang gadis atau perempuan, melainkan lebih kepada pribadi sang laki-laki yang "memilikinya". Jadi, hukuman atas pemerkosaan seringkali berupa denda, yang harus dibayarkan kepada sang ayah atau suami yang mengalami "kerugian" karena "harta miliknya" "dirusak". Posisi ini kemudian diubah di banyak lingkungan budaya karena pandangan bahwa, seperti halnya sang "pemilik", si perempuan itu sendiripun mestinya ikut mendapatkan ganti ruginya¹.

Tentara Yunani, Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi, secara rutin memperkosa kaum perempuan maupun anak-anak lelaki di kota-kota yang ditaklukkan. Perilaku yang sama masih terjadi bahkan hingga tahun 1990-an, ketika pasukan-pasukan Serbia yang menyerang

¹ "Pemeriksaan," *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://in.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan> (13 Februari 2010).

Bosnia dan Kosovo, melakukan kampanye yang penuh perhitungan dengan memperkosa kaum perempuan dan anak-anak lelaki di daerah-daerah yang mereka kuasai.

Dalam sistem hukum di Britania Raya dan di Amerika Serikat, yang dimaksudkan dengan "pemeriksaan" biasanya adalah apabila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengannya. Hingga akhir abad ke-20, hubungan seksual yang dipaksakan oleh seorang suami terhadap istrinya tidak dianggap sebagai "pemeriksaan", karena seorang perempuan (dengan maksud tertentu) tidak dianggap mempunyai hak untuk menolaknya. Kadang-kadang juga ada anggapan bahwa hubungan pernikahan merupakan pernyataan tersirat di muka untuk suatu hubungan seksual seumur hidup. Namun demikian, hukum pidana modern di kebanyakan negara Barat kini telah mengesahkan hukum yang menolak pandangan demikian. Kini pemeriksaan juga diartikan sebagai hubungan paksa oleh pasangan, seperti hubungan seksual vagina, dan tindak kekerasan seperti hubungan seksual anak yang biasanya dilarang dengan undang-undang sodomi.

Hingga kini di Skotlandia hanya perempuan saja yang dapat dikategorikan mengalami pemerkosaan².

Istilah "pemukosaan" kadang-kadang diartikan dengan sangat luas, hingga mencakup pula segala bentuk serangan seksual.

Pemukosaan, sebagai strategi perang, dilarang oleh hukum militer yang disusun oleh Richard II dan Henry V (masing-masing tahun 1385 dan 1419). Hukum-hukum ini merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman dan mengeksekusi para pemukosa pada masa Perang Seratus Tahun (1337-1453)³.

Di Indonesia dikenal hukum acara, baik itu hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peradilan agama, yang dalam proses Pengadilannya masing-masing memberikan beban pembuktian, untuk dapat menguatkan laporan yang mereka ajukan dengan menunjukkan berbagai macam alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan hukum.

Putusan-putusan yang dikaji tersebut juga memperlihatkan adanya afirmasi atas kerangka berpikir kritis yang telah menjadi dasar pemikiran

² “Encyclopaedia Britannica,” *Micropaedia Ready Reference and Index*, vol. 8, h. 566.

³ *Ibid.*, vol. 4, h. 1027.

teori hukum feminis yaitu bahwa pengalaman perempuan (sebagai korban tindak pidana kekerasan) tidak menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut juga menjadi refleksi bahwa bias gender yang secara implisit ada di dalam hukum, tidak terbaca oleh hakim. Lebih lanjut putusan tersebut memperlihatkan adanya reproduksi model dominasi laki-laki dalam masyarakat yang diterapkan oleh hukum yang bias gender kepada kenyataan konkrit yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban, karena kebijakan dan keputusan dengan pola seperti itu, pilihan-pilihan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan menjadi enggan untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepadanya, karena hal itu tidak mendatangkan keadilan baginya. Maka perempuan hanya disodori pilihan yang paling buruk, menerima tindak pidana kekerasan tersebut tetap berlangsung kepada dirinya atau melaporkannya dengan hasil akhir keputusan hakim yang belum tentu memenuhi rasa keadilannya⁴.

⁴ Atib Ajid, *"Pembuktian Kasus Perkosaan: Study Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"* Skripsi Sarjana, (Ujung Pandang Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1997), h. 23.

Hakim sebagai penafsir yang seharusnya melakukan interpretasi dengan melihat peraturan perundangan dari segi historisnya, mengaitkannya dengan perkembangan atas kondisi pada saat ini serta mencoba menerapkannya dengan pemikiran antisipatif, juga tidak tercerminkan pada putusan-putusan di atas. Sehingga pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap seorang anak di bawah umur pun, aturan diterapkan seperti halnya apabila korbannya adalah seorang dewasa. Padahal pada saat putusan tersebut dibuat, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengundangkannya melalui keputusan Presiden. Meskipun belum diadopsi dalam bentuk undang-undang, namun seharusnya hakim dapat mempertimbangkan secara lebih mendalam kondisi seorang anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dan dikaitkan dengan perhatian pemerintah pada hak-hak anak pada umumnya. Dengan demikian sebetulnya penafsiran antisipatif dapat dilakukan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara yang terkait dengan hal tersebut⁵.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,” dalam *Undang-undang Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.).

Sudah saatnya hakim lebih arif membuat pertimbangan yang adil untuk memvonis pelaku perkosaan lebih berat sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan keamanan bagi warga Negara. Selain itu, sudah sepantasnyalah hukum pidana terutama dalam tindak pidana perkosaan lebih diperbaharui untuk menyesuaikan dengan hak asasi manusia, setidaknya melalui yurisprudensi atau fatwa dari Mahkamah Agung. Dalam nilai-nilai Islam yang menyangkut dengan perlindungan wanita dapat diadopsi untuk menindak pelaku perkosaan yang tiap bulan menunjukkan kesamaan dengan kejahatan lain, lihat tabel 1).

TABEL 1. ANGKA KEJAHATAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA BULAN JANUARI S/D AGUSTUS TAHUN 2009

| JENIS | B U L A N | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust |
| PEMBUNUHAN | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| PENGANIAYAAN | 13 | - | 15 | 3 | 7 | 9 | 7 | 14 |
| PERKOSAAN | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| PENCURIAN | 10 | 1 | 25 | 7 | 9 | 15 | 3 | 7 |

Dari tabel di atas, dilihat secara jelas bagaimana kasus perkosaan cenderung tidak ada bahkan nihil didapatkan dalam kasus persidangan. Hal demikian menurut penulis tidak tepat bila dipahami sebagai tegaknya

⁶ Data Pengadilan Negeri Sungguminasa, (17 September 2009).

hukum yang maksimal. Justru penulis lebih berpendapat bahwa penurunan angka itu karena banyaknya kasus perkosaan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian). Ini tidak terlepas dari banyaknya kasus perkosaan yang tidak berlanjut karena kurangnya bukti atau vonis untuk pelaku perkosaan terlalu ringan, sementara korban perkosaan menderita gangguan kejiwaan seumur hidup dan hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan hak asasi manusia.

Dari kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa, perkosaan bisa menimpa perempuan dari segala tingkatan umur, dan paling beresiko tinggi menjadi korban perkosaan adalah wanita usia 13-22 tahun. Sebagian kasus perilaku kejahatan ini ternyata dilakukan oleh ayah kandung, bapak tiri atau tetangga⁷

Ada pendapat yang mengatakan bahwa anak perempuan diperkosa, karena sebelumnya telah memperlihatkan tingkah laku dan sikap yang memancing pelaku perkosaan untuk agresif, namun pada umumnya perempuan menjadi korban perkosaan karena: 1) kurang waspada atau terlalu naif dan terlalu baik berkomunikasi dengan pelaku perkosaan; 2)

⁷ Burhanuddin Latief, "Stress Pasca Trauma Perkosaan", *Harian Pedoman Rakyat*, 11 Januari 1993, Ujung Pandang, h.4.

tanpa disadari bersikap merayu, dimana cara bertingkah laku yang diinterpretasikan oleh calon pelaku pemerkosaan sebagai undangan perlakuan seksual; dan 3) wanita dalam keadaan peka atau mudah diperkosa misalnya pelaku pemerkosaan mencari korban-korban yang menderita gangguan mental, cacat fisik oleh keadaan kurang sadar akibat keracunan obat atau alkohol⁸. Masalah perkosaan sangat terkait dengan berbagai aspek kehidupan seperti hukum, medis, sosial dan kejiwaan, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai kejahatan yang merendahkan martabat manusia. Jadi tidaklah mengherankan jika akhir-akhir ini masyarakat menuntut agar pelaku perkosaan dihukum berat, kalau perlu dihukum mati.

Sebagaimana hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mengatakan bahwa: perlu dilakukan kehati-hatian dalam penanganan kasus perkosaan serta harus tegas karena untuk membuktikan secara hukum seseorang yang menjadi korban perkosaan sangat rumit. Dalam hukum positif, selain harus ada saksi, juga harus

⁸ *Ibid.*

dilakukan pemeriksaan medis untuk membuktikan seseorang yang menjadi korban perkosaan⁹.

Dengan diawali dari catatan secara umum atas putusan-putusan yang dikaji tersebut, pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat putusan-putusan tersebut secara lebih khusus. Putusan yang akan dikaji secara khusus hanya beberapa putusan yang memperlihatkan adanya hal-hal tertentu yang patut diberikan kritik dengan pendekatan teori hukum feminis.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian mengenai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai referensi atau pijakan dalam melengkapi skripsi penulis.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, penulis dapat mengungkapkan pokok permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, yaitu; “Bagaimana pembuktian tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri

⁹ Wawancara dengan Agus Budiarto di Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Juli 2009.

Sungguminasa?” dari pokok masalah tersebut, maka akan diajukan sub masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembuktian tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan?
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pembuktian pidana perkosaan di Pengadilan?

C. Hipotesis

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka sebagai kerangka teori atau landasan berpijak dalam membahas skripsi ini, penulis memberikan jawaban yang bersifat sementara dalam pembahasan ini :

1. Pembuktian kasus perkosaan lebih diutamakan si korban melaporkan kejahatan yang dialaminya, yang kemudian diperkuat dengan saksi dan pembuktian lain seperti hilang keperawanan.
2. Dalam Islam pelaku perkosaan bila terbukti secara jelas melakukan perkosaan, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan hukum positif sebagaimana dalam pasal 285 KUH. Pidana pemerkosa

dihukum penjara selama 12 tahun lamanya. Sepintas dipandang dari stereotip negatif barat hukum Islam terlalu kejam, tetapi bila direnungkan kembali justru hal ini sangat manusiawi, hubungan seksual dalam Islam jika disalurkan secara sah melalui pernikahan dipandang sebagai ibadah dan sebaliknya bila tidak mengikuti norma-norma yang ditetapkan, maka ancaman hukumannya pun sangat “berat”. Ini dimaksudkan untuk melindungi umat manusia dan pencemaran atau kejelasan keturunan.

3. Langkah yang dilakukan dalam pembuktian pidana perkosaan di Pengadilan mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan :

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”¹⁰.

D. Pengertian Judul

Judul skripsi ini ialah “Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri (Kajian Perbandingan Kasus-Kasus Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata yang dianggap penting, diantaranya sebagai berikut :

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti : 1). Sesuatu yang menyatakan suatu peristiwa; keterangan nyata; 2). Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat, sehingga pembuktian berarti: a). proses perbuatan, cara membuktikan b). usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang Pengadilan¹¹. Dalam pengertian ini pembuktian adalah suatu usaha dengan cara tertentu (metode) dan alat untuk mengungkapkan suatu kejadian. Pembuktian adalah menyakinkan

¹⁰ “Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.pdf” [http://www.komisiyudisial.go.id/Undang_Undang/Hukum Tata Negara/UU No 14 Thn 1970 \(13 Februari 2010\)](http://www.komisiyudisial.go.id/Undang_Undang/Hukum%20Tata%20Negara/UU%20No%2014%20Thn%201970%20(13%20Februari%202010).pdf).

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Cet. II; Jakarta : PN Balai Pustaka, 1989), h. 133

hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan sidang dalam suatu persengketaan¹².

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)¹³.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke dalam vagina, anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan.

Sidang Pengadilan Negeri adalah proses peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara¹⁴.

¹² H. Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 142.

¹³ Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 124.

Kajian adalah Suatu Proses untuk lebih memahami secara mendalam atau salah satu cara untuk mengetahui apa yang belum diketahui.

Perbandingan yang berasal dari kata “banding” yang berarti imbang, persamaan, tara¹⁵.

Kasus adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu hal¹⁶.

E. Metode Penelitian

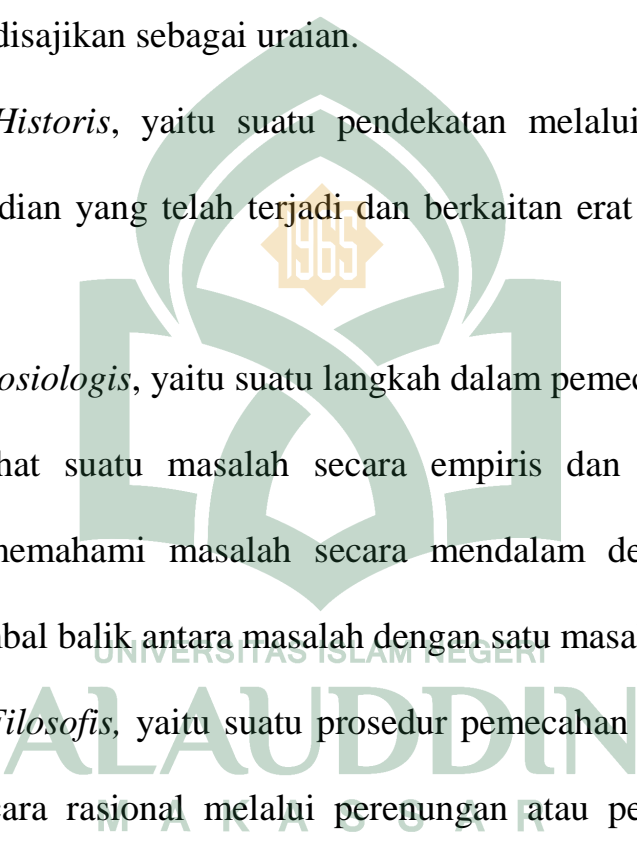
Untuk memenuhi standar ilmiah, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis berpatokan pada kriteria-kriteria ilmiah yang telah ditetapkan dan lazim digunakan atau dilaksanakan dengan metode penelitian. Metode yang dimaksud:

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam membahas objek permasalahan dalam skripsi ini, adalah :

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VIII, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 84.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit.*, h. 395.

- 
- a. Pendekatan *Yuridis* (hukum perundangan) yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, maksudnya bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul, maka dijadikan bahan kajian untuk disajikan sebagai uraian.
- b. Pendekatan *Historis*, yaitu suatu pendekatan melalui sejarah atau kejadian-kejadian yang telah terjadi dan berkaitan erat dengan objek penelitian.
- c. Pendekatan *Sosiologis*, yaitu suatu langkah dalam pemecahan masalah dengan melihat suatu masalah secara empiris dan analisis serta bagaimana memahami masalah secara mendalam dengan melihat hubungan timbal balik antara masalah dengan satu masalah yang lain.
- d. Pendekatan *Filosofis*, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek kajian dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan penelitian tinjauan lapangan (*field research*). Penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data, baik yang bersumber dari buku-buku, artikel dan data-data lain yang berkaitan serta memungkinkan untuk dipergunakan.

Pada dasarnya sumber data utama yang kami gunakan adalah data-data yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Di samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa staf seperti Hakim dan Panitera yang bertugas di Pengadilan Negeri Sungguminasa guna melengkapi data-data yang ada sebelumnya.

Adapun beberapa data yang diperoleh dari beberapa kasus tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah Perkara Nomor : 359/PID.B/2007/PN. SUNGGUMINASA dan Perkara Nomor : 298/PID.B/2008/PN. SUNGGUMINASA.

3. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Sebagaimana judul yang disebutkan di atas bahwa yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini ialah Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri, maka penulis berusaha untuk meramu

data-data yang ditemukan kemudian memberikan interpretasi guna memudahkan untuk dipahami.

Selain itu dalam mengolah dan menganalisa objek kajian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan mendekripsikan kembali temuan-temuan yang diperoleh.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai “Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri”, maka sangatlah erat hubungannya dengan beberapa buku yang telah ditulis oleh para pakar, mereka antara lain adalah Prof. DR. Hassan Hathout dan Abdul Munir Mulkan.

Inti pembahasannya adalah bahwa dalam pandangan Islam perkawinan hanya boleh dilakukan dalam batas usia, dan ditunjang dengan ekonomi dengan persyaratan birokratis yang sering tidak mudah dipenuhi. Akibatnya, pemenuhan hasrat seksual dipersulit dan dibatasi secara ketat, sehingga banyak yang melakukan pelanggaran (perkosaan).

Abdul Wahid Salayan. SH dalam bukunya Ensiklopedia Hukum membahas tentang pelanggaran susila dengan anak perempuan yang di bawah umur 15 tahun.

Atib Ajid dalam skripsinya yang berjudul Pembuktian Kasus Perkosaan (Study Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) menjelaskan bahwa hakim lebih banyak bertumpu pada bukti material, sehingga tidak menghiraukan bila banyak putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat umum. Maka dari itu hakim terus mempertimbangkan bukti immaterial seperti penderitaan korban.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia, menjelaskan arti kata hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana dan berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.

Adapun pembahasan mengenai hukum pidana dijelaskan oleh Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum

Pidana”, mengatakan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban yang dulunya belum ada hanya norma-norma yang sudah ada yang dipertegas yaitu mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan.

Dengan demikian maka masalah perkosaan tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, hukum, kejiwaan serta medis, atau campuran dari aspek-aspek itu. Perkosaan jelas melanggar hukum karena yang diperkosa adalah wanita yang bukan istrinya dan atas dasar paksaan, di luar kehendak wanita korban perkosaan.

Karena melihat minimnya pihak yang mengkaji tentang pembuktian tindak pidana perkosaan dalam Sidang Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Sunguminasa, maka penelitian ini sangat penting dilakukan guna menambah khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum pidana tindak perkosaan.

G. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang konsep pembuktian perkosaan khususnya pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjadi bahan analisis bagi semua pihak, utamanya bagi kalangan masyarakat ilmiah, sehingga dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka membangun ummat Islam dan Negara Indonesia lebih baik, yakni dapat mencegah terjadinya perkosaan yang dapat merugikan wanita.

Di samping itu, kegunaan lain adalah formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna menyelesaikan naskah skripsi ini dalam rangka studi untuk pengembangan ilmu-ilmu ke Islaman khususnya ilmu-ilmu hukum umumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

DAN PERKOSAAN

A. Pengertian Pembuktian.

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti : 1). Sesuatu yang menyatakan suatu peristiwa; keterangan nyata; 2). Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat, sehingga pembuktian berarti: a). proses perbuatan, cara membuktikan b). usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang Pengadilan. Dalam pengertian ini pembuktian adalah suatu usaha dengan cara tertentu (metode) dan alat untuk mengungkapkan suatu kejadian¹⁷

Pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan sidang dalam suatu persengketaan¹⁸.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas

¹⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (Cet. II Jakarta : PN Balai Pustaka, 1989). h. 133.

¹⁸ H. Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Cet. IV, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995). h. 142.

atau diikat oleh undang-undang, maka hal tersebut timbul tiga teori, yaitu:

1. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian diserahkan pada hakim.
2. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian.
3. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak¹⁹.

Dari kutipan di atas secara rinci dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Teori pembuktian bebas menghendaki adanya kebebasan kepada hakim untuk menilai bukti atau sesuatu yang dapat membuktikan suatu perkara. Artinya tidak dibutuhkan aturan-aturan mengikat yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim.

¹⁹ *Ibid.*, h. 146.

Disini hakim harus mampu membuktikan walaupun tanpa petunjuk atau ketentuan-ketentuan²⁰.

2. Teori pembuktian negatif menghendaki adanya ketentuan yang mengikat. Artinya hakim tidak boleh membuktikan sesuatu karena alasan yang tidak diatur. Hakim harus tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Di dalam pasal 1905 KUH. Perdata dijelaskan “keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya²¹.
3. Teori pembuktian positif menghendaki agar seorang hakim tetap berpedoman pada suatu ketentuan yang sudah dianggap mutlak. Di dalam pasal 1870 KUH. Perdata dijelaskan :

“Suatu akta otentik yaitu suatu akta yang memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”²².

Kutipan di atas menjelaskan bila yang digunakan adalah akta otentik, maka hakim harus tetap menjadikan akta otentik telah diakui secara obyektif kemampuan daya buktinya.

²⁰ R Subekti & R. Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. 24 Jakarta : Pradnya Paramita, 1992) h. 403.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 397.

Walaupun demikian, pendapat umum menghendaki teori pembuktian bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran²³.

Pembuktian dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara merupakan sarana yang harus sesuai dengan keadaan. Apabila berdasarkan alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) masalahnya akan menjadi jelas bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti lain. Akan tetapi jika masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) maka hakim harus memperhatikan alat bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu sendiri²⁴.

B. Fungsi Pembuktian.

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan dengan maksud agar penggugat dan tergugat atau penuntut umum dan terdakwa masing-masing memperoleh rasa keadilan.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Cet. 1 Edisi Ketiga, Yogyakarta, Liberty, 1988), h. 109.

²⁴ H. Fathurrahman Djamil, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana Islam" dalam H. Andi Rasdiyanah dkk... (peny), *Mimbar Hukum*. (Jakarta : PT. Intermasa, 1993), h. 84.

“Dalam sidang Pengadilan hakim berusaha menyelesaikan perkara itu dengan seadil-adilnya. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya atau ia berusaha untuk mengetahui kasus itu secara langsung. Kedua cara tersebut di atas dirasakan sulit. Sehingga kalau hanya berpegang teguh kepada dua cara itu saja dikhawatirkan akan tertunda perkara, bahkan lebih dari itu akan terbengkalailah penyelesaian”²⁵.

Kita ketahui bahwa manusia mempunyai keterbatasan, olehnya itu hakim dibolehkan untuk menerima keterangan-keterangan yang dapat menimbulkan prasangkaan yang kuat, berupa keterangan saksi yang adil, atau alat-alat bukti lainnya. Ini terlepas dari kemungkinan keterangannya. Kasus karena menurut kebiasaan, bahwa orang-orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianggap akan memberikan keterangannya secara benar, meskipun kemungkinan ia berlaku tidak benar. Hal ini memberikan kesempatan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya.

Sehubungan dengan ini, Muhammad salam Mazkur menjelaskan sebagai berikut :

“Dan oleh berpegang teguh dengan prinsip di atas akan menyulitkan manusia dan akan terlantarnya sebagian besar hak mereka, maka Syar’I menerima dasar-dasar (bukti-bukti), setelah mengambil langkah yang cermat, pengetahuan hakim dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti (seperti) pengakuan

²⁵ *Ibid.*

tergugat atau tertuduh, mendengarkan saksi-saksi itu. Akan tetapi yang lazim, bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, semua itu dilakukan atas kondisi dan situasi darurat”²⁶.

Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau tergugat dalam bentuknya masing-masing mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Bahkan kalau diteliti ternyata bahwa kekuatan hukum putusan berdasarkan penglihatan hakim langsung²⁷.

C. Pengertian Perkosaan dan Jenis-jenisnya.

Kata “perkosaan” berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, kekerasan atau pelanggaran dengan kekerasan²⁸. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pria kepada seorang wanita yang bukan istrinya tanpa kemauan si wanita. Perkosaan adalah tindakan melanggar hukum. Perkosaan mengandung aspek-aspek kejiwaan bagi pemerkosanya maupun kejiwaan bagi yang diperkosa. Masalah kejiwaan ini dapat bersifat individual juga dapat menggejala pada masyarakat. Masalah perkosaan adalah juga masalah

²⁶ *Ibid.*, h. 85.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. cit., h. 673.

medis, seorang yang diperkosa atau yang memperkosa berkaitan dengan aspek kesehatan badan maupun jiwa. Seorang wanita yang diperkosa akan mengalami kerusakan badan dibagian organ seksualnya, atau meninggalkan trauma²⁹.

Istilah perkosaan terdapat di dalam KUH. Pidana adalah terjemahan kata “Verkrachting” dari bahasa Belanda yang berarti “perkosaan untuk bersetubuh”. Ini berarti perkosaan yang dimaksud di dalam KUH. Pidana masih kurang tepat, oleh karena dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja belum menunjukkan pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh”, dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUH. Pidana ini harus disebut “perkosaan untuk bersetubuh”³⁰.

Kedua tindak pidana tersebut di atas mempunyai perbedaan yaitu:

1. “Perkosaan untuk bersetubuh” yang diatur dalam pasal KUH.

Pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita. Sedangkan “perkosaan untuk cabul” pasal (289

²⁹ Lihat, Koentjoro Soehadi, “perkosaan dan Perilaku Seks Pria”. *Majalah Fakta*. No. 221 Edisi 1 Oktober, 1992. h. 20.

³⁰ Lihat, Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, (Bandung : CV Remaja Rosda Karya, 1986), h. 167.

KUH. Pidana) juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

2. “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul juga dapat dilakukan dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul”³¹.

Tindak pidana perkosaan yang diatur di dalam pasal 285 KUH.

Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau yang dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”³².

Ini mirip dengan tindakan pidana yang diatur dalam pasal 289

KUH. Pidana yang berbunyi :

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

³¹ *Ibid.*

³² R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), h. 302.

Tindak pidana itu disebut dengan “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” atau perkosaan atau cabul³³.

Dari pengertian perkosaan pada pasal 258 KUH Pidana maka dapat diuraikan dalam empat unsur yaitu :

Pertama, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam.

Kedua, ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam untuk takut karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya. Ancaman berupa penodongan dengan senjata tajam atau alat lain, maupun dengan suatu suara yang mengutarakan akibat-akibat yang dapat merugikan bagi si terancam jika tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.

Ketiga, memaksa yaitu suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan lain untuk mengikuti keinginan atau kehendak dari si pemaksa itu, sehingga si terpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dan pemaksaan ini pada dasarnya dibarengi dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

³³ *Ibid.*, h. 305.

Keempat, yang dimaksud dengan bersetubuh adalah tindakan memasukkan anggota kelamin pria ke dalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa³⁴.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan jalan paksaan disertai dengan ancaman bila wanita tidak mau melayaninya.

Bila ingin membicarakan suatu aspek dari kehidupan hukum dinegara kita, maka selalu dirasa perlu untuk melihat permasalahannya dari berbagai aspek, demikian halnya dengan perkosaan. Oleh sebab itu tidak semestinya pengertiannya saja dibicarakan, tetapi juga jenis-jenis perkosaan. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang cukup³⁵.

Hampir setiap hari ada saja media cetak yang menurunkan berita tentang perkosaan. Didasari atau tidak nampaknya berita semacam itu sudah merupakan hal yang biasa-biasa dan bukan berita istimewa. Apakah itu pertanda manusia Indonesia sudah demikian individualistis

³⁴ *Ibid*

³⁵ Lihat Burhanuddin Latief, "Stress Pasca Trauma Perkosaan", *Harian Pedoman Rakyat*, 11 Januari 1983, Ujung Pandang, h. 4.

ataukah nilai-nilai budaya sudah berubah. Tragisnya, anak di bawah umur yang belum mengerti apa-apa justru menjadi korban kebuasan seks³⁶.

Steven box, membagi jenis-jenis perkosaan sebagai berikut :

1. “Sadistic rape”, yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara sedikit. Si pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap tubuh si korban³⁷.
2. “Anger rape” merupakan ungkapan pemerkosaan yang karena kemarahan dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksualnya. Yang dituju hanya keinginan untuk mempermalukan si korban³⁸.
3. “Domination rape” yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaan-nya, majikan yang memperkosa bawahannya. Tidak ada maksud untuk

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

³⁸ *Ibid.*,

menyakitinya, keinginan yaitu bagaimana memilikinya secara seksual³⁹.

4. “Seduction turned into rape” yaitu pemerkosaan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan si korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan tidak ada maksud mempermalukan. Yang ditujukan adalah kepuasan si pelaku dan si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas⁴⁰.
5. “Eksploitation rape” merupakan jenis perkosaan dimana si wanita sangat bergantung dari si pelaku, baik sosial maupun ekonomi. Hal tersebut terjadi dimana si istri dipaksa oleh suami. Kalaupun ada persetujuan, itu bukan karena ada keinginan seksual dari istri melainkan acap kali demi kedamaian rumah tangga⁴¹.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa pengertian perkosaan secara krimonologis lebih luas disbanding dengan pengertian secara yuridis, terjadi kesulitan untuk membuktikan

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, h. 72

⁴¹ *Ibid.*,

adanya unsur kekerasan sesuai dengan pasal 285 KUH. Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”⁴².

Menurut pasal 285 KUH. Pidana terdapat beberapa unsur yang harus dipatuhi, yaitu : unsur kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain, yang diatur di dalam KUH. Pidana. Namun dalam perspektif kriminologi bahwa sesungguhnya bukanlah unsur kekerasan yang harus utama dan dominan, melainkan unsur “consent” atau persetujuan⁴³.

Gebhard dalam buku *Sex Offender An Analisis Of Types*, dikutip oleh soehadi (1992) menyebutkan, ada lima pria yang memungkinkan menjadi pemerkosa :

⁴² R. Sughandi, *Lo.cit.*

⁴³ Lihat, Made Darma Weda, *Op. cit.*, h. 70.

1. Pria yang mempunyai efek pada intelegensia atau efek cara berfikir (reterdasi mental, psikotik), keracunan alkohol dan obat-obatan lain.
2. Pria dengan defek pada proses sosial atau defek dalam pemahaman.
3. Pria dengan defek perkembangan kepribadian (yang memiliki perkembangan dasar amoral atau sosiopati).
4. Pria neurosis atau mempunyai defiasi tertentu pada kejiwaan (pria ini sewaktu-waktu dapat berbuat sadis).
5. Pria normal, lingkungan dapat memaksanya memperkosa dengan cara-cara tertentu. Kelompok ini sukar dikatakan melanggar hukum. Sebab caranya halus dan terselubung (pemerkosa teman atau kenalan). Pria normal ini dikelompokkan dalam pemerkosa yang terang-terangan. Yang jelas, bentuk perkosaan apapun adalah perbuatan melanggar hukum⁴⁴.

⁴⁴ M. Ghufuran H. Kordi K, "Hukum dan Hakim", *Majalah Fakta*, No. 304. Edisi Maret 1996, h. 4.

Dari lima point yang dikemukakan oleh Gebhard di atas, dapat dipahami bahwa : 1). Pria yang mengalami gangguan berfikir karena pengaruh keracunan obat-obatan atau alcohol berpotensi melakukan perkosaan. 2). Pria yang mengalami perubahan sosial yang keliru mungkin karena pengaruh pendidikan yang salah, menyebabkannya menganggap perkosaan adalah perbuatan yang wajar. 3). Pria yang mengalami gangguan mental, karena pendidikan yang tidak tepat atau anak-anak yang lahir dari broken home menyebabkan mereka menjadi tidak bermoral. Mereka ini biasanya dibentuk oleh lingkungan jalanan yang keras, sehingga mereka mudah melakukan perkosaan. 4). Pria yang mengalami gangguan kejiwaan karena berbagai faktor yang membentuknya biasa melakukan perkosaan karena tidak sengaja, sama seperti melakukan aktivitas sadis lainnya, seperti pembunuhan. 5). Kelompok pemerkosa dengan cara-cara tertentu ini memang sangat menyulitkan pembuktian, tetapi yang dilakukan adalah tetap perkosaan karena dilakukan secara paksa⁴⁵.

⁴⁵ *Ibid.*

D. Sebab dan Akibat Perkosaan.

Untuk memperjelas tentang perkosaan dan jenis-jenisnya, perlu kiranya dikemukakan sebab dan akibat mengapa seseorang melakukan perkosaan. Dengan kata lain latar belakang yang mendorong sehingga perbuatan tersebut dilakukan. Sebab tidak mungkin ada peristiwa tanpa penyebab.

Peristiwa perkosaan yang terjadi dapat disebabkan faktor dalam diri pelaku karena adanya nafsu seks yang berlebihan yang tidak terkendalikan karena pikirannya telah diracuni perbuatan yang berbau seks. Sehingga para pelaku mengambil sasaran pemuas nafsunya. Disamping itu tidak adanya atau kurangnya menghayati hukum-hukum agama maka orang tersebut dapat mengekang dirinya dan dapat terhindar dari perbuatan kenistaan⁴⁶.

Menariknya kasus-kasus perkosaan yang terjadi akhir-akhir ini karena pelakunya tidak hanya dari kalangan laki-laki awam akan tetapi juga dari kalangan oknum penegak hukum. Korbannya pun tidak terbatas pada perempuan dewasa, namun juga terjadi pada anak-anak di bawah umur. Dan yang lebih memperhatikan lagi karena

⁴⁶ Lihat, Kusnadi, *Masalah Seksual* (Surabaya : Usaha Nasional, 1990), h. 16.

adanya kasus perkosaan dimana pelakunya adalah keluarga dekat dengan si korban sendiri seperti saudara, saudara ipar, paman terhadap keponakan, bahkan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah ayah dari si korban sendiri⁴⁷.

Dalam hal ini Dr. Koentjoro Soehandi berpendapat bahwa “pada dasarnya semua laki-laki menjadi pemerkosa, baik secara terselubung maupun terbuka bila memungkinkan”. Sehingga apabila laki-laki yang tidak dibesarkan dengan nilai budaya luhur dan agama, maka mereka memiliki keinginan untuk menjadi pemerkosa⁴⁸.

Perkosaan adalah hubungan seks yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita dengan jalan paksaan yang kadang-kadang disertai pula dengan ancaman bila seorang wanita tidak melayaninya. Maka dari itu perkosaan termasuk perbuatan keji dan dosa besar, karena tindakan tersebut merupakan kejahatan seks yang dilakukan di luar nikah, kasus ini terjadi sejak dulu hingga sekarang

⁴⁷ Lihat, M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam*, (Semarang : CV. Panca Agung, 1990), h. 50-52.

⁴⁸ Lihat, M. Ghufuran H. Kordi K, “Kekerasan Seksual”, *Pedoman Rakyat*, Ujung pandang, 19 Juli 1993, h. 4

sekalipun amat dibenci oleh kaum wanita namun masih saja terjadi kasus tersebut⁴⁹.

Laki-laki yang mempunyai efek untuk menjadi pemerkosa oleh karena laki-laki tersebut terbuai atau terlena oleh kemulusan tubuh si korban. Daya tarik yang tersimpan dalam diri seorang perempuan sering terlupakan bahkan mungkin tidak dijaga olehnya, sehingga laki-laki utamanya yang tidak tahan uji, menggunakan peluang yang ada untuk melampiaskan keinginannya. Disamping itu karena kemajuan yang telah dicapai oleh semua umat di semua lapangan kehidupan, membuka kesempatan kepada wanita untuk tidak berkarier di segala lapangan pekerjaan yang diminati dan dikuasainya, termasuk pekerjaan yang menuntut waktu sampai larut malam. Mengingat kejahatan susila yang satu ini adalah proses *duet frame of crime* maka si korban juga mempunyai peranan sehingga terciptanya kejahatan perkosaan⁵⁰.

Berdasarkan kenyataan bahwa kasus-kasus perkosaan yang muncul dipermukaan umumnya lebih banyak disebabkan oleh perilaku

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lihat, Abd. Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern* (Bandung : PT. Tarsito, 1993), h. 70.

korban dan pelaku sebelumnya sudah saling mengenal atau ada hubungan, baik sebagai teman biasa, istimewa, keluarga maupun interaksi kepentingan pekerjaan.

Kondisi wanita juga dapat menjadi penyebab sehingga terjadinya perkosaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Rosita, bahwa :

“Situasi dan kondisi si korban dapat merangsang pihak pelaku melakukan kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat melakukan tindakan-tindakan, tidak berkenaan atau rela untuk menjadi korban. Situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan”⁵¹.

Jadi kita bijaksana bila terjadi kasus perkosaan selalu dilimpahkan kepada pihak pelaku. Pelaku perkosaan sudah jelas berjenis laki-laki, dalam hal ini mustahil dapat mewujudkan niatnya tanpa memperoleh peluang-peluang inilah datangnya dari pihak wanita sebagai calon korban, namun terkadang korban tidak menyadari hal-hal seperti ini.

⁵¹ Arif Rosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta : Akademi Pressindo, 1993), h. 104.

Dari uraian di atas, dapat dipahami secara tersirat, baik si pelaku maupun si korban dalam masalah perkosaan perlu adanya pengawasan yang terkordinir.

1. *Akibat Perkosaan*

Perkosaan yang dilakukan oleh seseorang sungguh besar akibatnya atau efeknya dari si pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya. Karena perkosaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kehormatan seseorang sehingga dalam kehidupan bermasyarakat banyak membawa efek yang fatal, disamping itu tindak perkosaan membawa kerusakan yang besar dan tekanan jiwa baik itu bagi pelaku dan korban perkosaan walaupun tidak sama dalam merasakannya⁵².



⁵² *Ibid.*, h. 106.

BAB III

PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP

PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

PERKOSAAN

C. Pengertian Visum et Repertum

Banyak kasus terjadi terutama kasus perkosaan yang sulit diselesaikan secara tuntas apabila mengacu pada peraturan hukum yang ada saat ini. Secara umum hukum belum memberikan perlindungan yang cukup memadai utamanya perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Korban atau saksi korban yang seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya seringkali dilanggar haknya, bahkan seringkali diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pembuktian di dalam persidangan serta pencarian bukti-bukti, seringkali justru menyudutkan korban perkosaan, sehingga korban perkosaan lebih menghindari dari penyelesaian hukum. Salah satu cara memperjuangkan hak-hak korban perkosaan adalah melalui pengumpulan bukti-bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat

posisi korban, serta mengungkapkan tindak pidana perkosaan dalam persidangan di Pengadilan. Berbagai upaya dilakukan dalam memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana perkosaan. Bukti-bukti tersebut berhubungan erat dengan tersangka, saksi dan korban perkosaan itu sendiri. Bukti-bukti sangat diperlukan mengingat tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang proses persidangannya dilakukan secara tertutup dan tindak pidana ini baru diproses apabila ada laporan dari korban atau orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan akan sangat sulit menemukan bukti-bukti dalam mengungkap kasus perkosaan. Dalam proses mengungkap tindak pidana perkosaan, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan data maupun fakta-fakta mengenai suatu tindak perkara pidana perkosaan. Secara outentik Bukti-bukti yang dikumpulkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan si pelaku benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan. Tetapi seringkali para penegak hukum kesulitan menemukan bukti-bukti yang dapat membuktikan unsur-unsur telah dilakukannya tindak pidana perkosaan oleh si pelaku, karena tindak pidana ini merupakan tindak pidana

kesusilaan yang menyangkut harkat dan kehormatan seseorang serta bersifat pribadi. Artinya tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang seringkali sulit diungkap. Kesulitan yang seringkali dialami adalah sulitnya menemukan bukti-bukti dan saksi tindak pidana ini. Salah satu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana ini adalah dengan meminta bantuan dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik) dengan meminta laporan berupa Visum et Repertum. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya⁵³.

⁵³ Romli Atmasasmita, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi* (suatu analisis teori kasus perkosaan). Dalam Suparman Marzuki dkk (peny), *Pelecehan Seksua*, (Cet. I, Yogyakarta : UUI Yogyakarta, 1995), h. 15.

D. Fungsi Visum et Repertum

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.” Sedangkan mengenai bentuk Visum et Repertum sebagai alat bukti surat diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu Terdapat pada pasal 187 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut: Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ; d. Surat lain yang

hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain⁵⁴.

Peranan visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus perkosaan⁵⁵.



⁵⁴ Romli Atmasasmita. Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.184.

⁵⁵ *Ibid.*

BAB IV

SISTEM PEMBUKTIAN PADA PENGADILAN NEGERI

SUNGGUMINASA

E. Seputar Pengadilan Negeri Sungguminasa

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di sidang di Pengadilan Makassar. Baru pada tahun 1964 Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa Pengadilan Ekonomi Sungguminasa menempati sebuah ruangan sehingga perkara-perkara masih di sidang di Pengadilan Makassar⁵⁶

Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari

⁵⁶ “Pengadilan Negeri Sungguminasa,” *Situs Resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa*. (22 Mei 2010).

Pemerintah Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai dengan tahun 1970-an.

Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A⁵⁷.

Karena Gedung kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa⁵⁸.

Tahun 2003 Pengadilan Negeri Sungguminasa diusul Kenaikan kelas menjadi Kelas I B dan pada tanggal 17 Februari 2004 Surat Keputusan kenaikan kelas menjadi Kelas I B diterima. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005⁵⁹.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

VISI

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, profesional, dan memberikan pelayanan hukum berkekuatan, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik⁶⁰.

MISI

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses layanan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain
- Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

⁶⁰ *Ibid.*

Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati⁶¹.

F. Alat-alat Bukti di Pengadilan Negeri Sungguminasa

- a. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut sehingga tidak menghiraukan bila banyak putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat umum. Hakim terus mempertimbangkan bukti immaterial seperti penderitaan korban⁶².

Dari Informasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sungguminasa mengenai alat-alat bukti yang digunakan tidak jauh beda dari apa yang digunakan pada pengadilan negeri pada umumnya yakni formulasi dari

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), h. 11.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengenai alat bukti yang sah⁶³.

❖ *KUHAP*

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

a. ***Keterangan Saksi***

Dinyatakan oleh pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana khususnya pemerkosaan yang mana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu⁶⁴.

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni:

⁶³ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 September 2009.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *op. cit.*, h. 11.

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri”⁶⁵.

2) *Pengecualian-pengecualian*

Pasal 1 butir 26 tersebut menyebutnya dengan “orang yang dapat memberikan keterangan”. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang di dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur di dalam pasal-pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Meskipun ada pengecualian tetapi sebenarnya menjadi saksi adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan

⁶⁵ *Ibid.*

pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku (penjelasan pasal 159 ayat (20) KUHAP)⁶⁶.

Pengecualian yang termasuk di dalam *pasal 168 KUHAP* adalah kelompok orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kelompok ini terdiri dari:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pengecualian yang tertuang pada *pasal 170 KUHAP* berkaitan dengan kewajiban *menyimpan rahasia jabatan*. Dalam ayat (1) pasal 170 KUHAP ditegaskan, “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan

⁶⁶ *Ibid.*, h. 12.

dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, “bahwa Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”⁶⁷.

Pengecualian berikutnya adalah tertuang di dalam pasal 171 KUHP, yang mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak di bawah umur lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Mengenai sejauhmana kekuatan bukti dari keterangan yang diberikan, oleh penjelasan pasal 171 ditegaskan: “Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggung-

⁶⁷ *Ibid.*

jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja⁶⁸.”

3) *Kewajiban mengucapkan sumpah atau janji*

Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP mengucapkan sumpah atau janji adalah wajib bagi saksi. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa isi maupun tata cara pengambilan sumpah atau janji haruslah sesuai perundang-undangan yang mengatur sumpah atau janji yang berlaku (pasal 76 ayat (1) KUHAP).

- Ayat (3) menyatakan, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
- Ayat (4) berbunyi, “Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan⁶⁹.”

⁶⁸ *Ibid.* h. 13.

⁶⁹ *Ibid.* h. 14.

Dari rumusan pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP di atas maka:

- a. Pengucapan sumpah atau janji adalah wajib.
- b. Pengucapan sumpah atau janji dilakukan sebelum saksi atau ahli memberi keterangan, namun jika dianggap perlu dilakukan setelah selesai memberi keterangan.

Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah adalah pengenaan sandera, seperti diatur oleh pasal 161 KUHAP⁷⁰.

Pasal 161 KUHAP menyebutkan:

- 1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara (RUTAN) paling lama empat belas hari.

⁷⁰ *Ibid.*

- 2) Dalam hal tenggang waktu penyadaraan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP). Diterangkan lebih lanjut oleh pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain⁷¹.”

4) *Keterangan palsu*

Ada empat ayat dalam pasal 174 KUHAP yang mengatur mengenai keterangan saksi yang disangka palsu, yaitu:

- Ayat (1) apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya

⁷¹ *Ibid.*, h. 24

supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu⁷².

- Ayat (2) apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu⁷³.
- Ayat (3) dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang⁷⁴.
- Ayat (4) jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai⁷⁵.

⁷² R. Sughandi, *op. cit.*, h. 280.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Ancaman pidana terhadap saksi yang memberi keterangan palsu dengan dakwaan sumpah palsu adalah sebagaimana diatur pasal 242 ayat (2) KUHP. Ancaman pidananya adalah 9 tahun, jika keterangan palsu tersebut merugikan terdakwa atau tersangka⁷⁶.

5) *Isi keterangan saksi*

Baik pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHP mensyaratkan bahwa isi keterangan saksi haruslah yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Ketentuan demikian dipertegas oleh pasal 185 ayat (5) KUHP, “bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.” Juga dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan, “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu⁷⁷.”

6) *Pemeriksaan terhadap saksi*

Secara garis besar pemeriksaan terhadap saksi di sidang Pengadilan sebagai berikut:

⁷⁶ R. Subekti & R. Tjirosudio, *op. cit.*, h. 303.

⁷⁷ Bambang Waluyo, *op. cit.*, h. 16.

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum (pasal 160 ayat (1) a KUHAP)⁷⁸.
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (pasal 160 ayat (1)b KUHAP).
- c. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa (pasal 160 ayat (1)c KUHAP).
- d. Pemeriksaan identitas saksi oleh Hakim ketua sidang meliputi, “nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.” Bersamaan dengan pertanyaan tentang identitas, kepada saksi juga diajukan pertanyaan-pertanyaan (sebelum memberi keterangan) yaitu:
- Apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan pidana?
 - Apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat beberapa dengan terdakwa?

⁷⁸ *Ibid.*, h. 17.

- Apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya? (pasal 160 ayat (2) KUHAP).
- e. Pada dasarnya saksi memberi keterangan dipersidangan dengan hadirnya terdakwa. Namun apabila hakim menganggap jika terdakwa hadir di sidang saksi akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberi keterangan, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar sidang untuk sementara selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi (vide penjelasan pasal 173 KUHAP).
- f. Apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia maka hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa dengan kewajiban bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan semua keterangan saksi dengan benar (pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- g. Mengenai saksi yang bisu atau tuli, cara pemeriksaannya menurut pasal 178 KUHAP dibedakan dua hal, yakni:
 - Apabila saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan saksi yang bersangkutan sebagai penerjemah.

- Apabila saksi bisu dan atau tuli dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawabannya dibacakan.
 - h. Ditentukan oleh pasal 179 ayat (2) KUHAP bahwa semua ketentuan yang berlaku bagi para saksi, berlaku pula bagi ahli yang memberi keterangan ahli. Persyaratannya adalah bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 7) *Kekuatan pembuktiannya*
- a). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP)⁷⁹.
 - b). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan

⁷⁹ *Ibid.*, h. 18.

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (pasal 185 ayat 4 KUHAP).

c). Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan (pasal 185 ayat (6) KUHAP):

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

d). Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (pasal 185 ayat (7) KUHAP).

b. *Keterangan Ahli*

1) *Keterangan yang diberikan*

- Apabila kita simak pasal 120 dan penjelasan pasal 186 KUHAP ini, maka “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.” Bunyi penjelasan ini terlihat tidak konsekuen dengan bunyi pasal 186 KUHAP, oleh karena apa yang dinyatakan oleh penjelasan tersebut justru lebih tepat disebut sebagai alat bukti surat⁸⁰.

2) *Kewajiban mengucapkan sumpah*

Seorang ahli sebelum memberikan keterangan ada keharusan untuk mengucapkan sumpah atau janji (pasal 161 KUHAP). Namun demikian jika Pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan (pasal 160 ayat (4) KUHAP)⁸¹.

⁸⁰ R. Sughandi, *op. cit.*, h. 105.

⁸¹ *Ibid.*

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (pasal 161 ayat (2))⁸².

3) *Isi keterangan ahli*

Berbeda dengan saksi, untuk keterangan ahli adalah tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya. Jadi keterangan ahli adalah mengenai penilaian dan kesimpulan terhadap suatu hal atau peristiwa berdasar atas keahliannya. Mengenai perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli (Wirjono Prodjodikoro, 1967:87-88) menyatakan: “Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal itu⁸³.”

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana Indonesia*, Djakarta: Sumur Bandung, 1967, h. 21.

c. *Surat*

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain hal tersebut dijelaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan jadi harus dikuatkan dengan sumpah⁸⁴.

d. *Petunjuk*

Pengertian petunjuk dijelaskan dalam pasal 188 ayat 1 yakni perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah seorang hakim karena hal tersebut bisa menjadi alat bukti pengamatan oleh hakim selama persidangan. Tapi tidak terlepas dari itu hakim juga harus memiliki dasar penilaian berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa⁸⁵.

⁸⁴ Bambang Waluyo, *op. cit.*, h. 21.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 22.

e. *keterangan terdakwa*

Definisi dari keterangan terdakwa diformulasikan pada pasal 189 ayat 1 KUHAP yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui dan alami sendiri⁸⁶.

G. Sistem Pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sungguminasa penulis dapat mengambil sebuah benang merah mengenai sistem pembuktian yang dianut di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tak lepas dari pasal 183 KUHAP:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan⁸⁷.”

H. Aplikasi dan Tujuan Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pada dasarnya setiap Pengadilan memiliki tujuan pembuktian yang sama yakni sama-sama ingin menemukan suatu kebenaran yaitu kebenaran materiil dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka para

⁸⁶ *Ibid.*, h. 23.

⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 September 2009.

komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur sebelumnya oleh undang-undang yang berlaku.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana

diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya⁸⁸.



⁸⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus perkosaan yang terus meningkat, adalah bukti bahwa belum optimalnya fungsi hukum dalam perlindungan hak asasi manusia.
2. Penyebab kasus perkosaan sangat kompleks, seperti pria yang mempunyai peluang, pria yang menderita gangguan kejiwaan, pria yang keracunan alkohol atau pria yang mempunyai latar belakang kehidupan yang memungkinkannya menjadi seorang pemerkosa.
3. Hakim lebih banyak bertumpu pada bukti material, sehingga tidak menghiraukan bila banyak putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat umum. Hakim terus mempertimbangkan bukti immaterial seperti penderitaan korban.

D. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam skripsi ini adalah:

1. Hendaknya hakim harus mempertimbangkan bukti immaterial seperti stress, trauma dan rasa malu dari korban perkosaan, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada pemerkosa akan menjadi lebih adil.
2. Hakim dapat mengadopsi prinsip-prinsip hukum dari sistem hukum lain, termasuk hukum Islam untuk mempertimbangkan sebuah putusan.
3. Sudah saatnya hukum positif yang menyangkut perkosaan ditinjau kembali, karena hukum kolonial tersebut selain telah ketinggalan zaman, juga tidak lagi memenuhi rasa keadilan dan Islam menjadi pertimbangan untuk diadopsi dalam perumusan hukum atau undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajid, Atib. *“Pembuktian Kasus Perkosaan: Study Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia.”* Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Krimonologi dan Victimologi* (suatu analisis teori kasus perkosaan). Dalam Suparman Marzuki dkk (peny), *Pelecehan Seksual*, (cet. I, Yogyakarta : UII Yogyakarta, 1995).
- , *Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Dalam Romli Atmasasmita (ed.) *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju 1995).
- “Encyclopaedia Britannica.” *Micropaedia Ready Reference and Index*, vol. 8. 1768.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Peraturan Pemerintah RI No. 27, LN. No. 36, TLN. No. 3250 Tahun 1983*, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurul Afiah, Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Atjara Pidana Indonesia*, Djakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, dan Tjitrosoedibio, R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1996.

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahid Salayan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum*. Padang: CV Mimbar.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 359/Pid.B/2007/PN.Sungguminasa.

-----, Putusan No. 359/Pid.B/2007/PN.Sungguminasa.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ASRUL MUH. DARWIS, SHI.



Di lahirkan di kota yang sederhana, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 26 Juni 1987 dari pasangan yang bijak dan penuh dengan tanggung jawab. Ibu: Muldiyati, Ayah: Muhammad Darwis,AM.

Menempuh Studi S-1 pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2010. untuk menjalin kontak dapat mengirim Email ke: aroelx@yahoo.com. HP: 085242464297; Home: (0411) 863331.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R